

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat(1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP

setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan. Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran), diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang harus menerapkan SAP pada masing-masing SKPD yang ada. Sehubungan dengan adanya pengembangan sistem akuntansi dan pengembangan SDM dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali baik sehingga hal itu menarik penulis untuk mengidentifikasi kesiapan Pemerintah Kecamatan Ilir Barat 1 dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah:

1. Bagaimana kesiapan Pemerintahan Kecamatan Ilir Barat I Palembang dalam mengimplementasikan laporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010?
2. Kendala apa saja yang di hadapi bagian bendahara Kecamatan Ilir Barat I Palembang dalam mengimplementasikan PP No 71 2010?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar penulisan laporan akhir ini lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada Analisis kesiapan pemerintah dalam implementasi laporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan laporan akhir adalah untuk mengetahui:

1. Kesiapan Pemerintah Kecamatan Ilir Barat I Palembang dalam mengimplementasikan Laporan Keuangan Berbasis Akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010.
2. Kendala yang dihadapi bagian bendahara Kantor Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dalam menerapkan PP No 71 Tahun 2010.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat Penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah khususnya Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang.

2. Bagi Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang

Sebagai masukan mengenai bagaimana menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis aktual.

3. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan akhir dimasa yang akan datang khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi pada tahun berikutnya.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:194), untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dalam beberapa metode dan teknik berikut ini :

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

a. *Interview* (Wawancara)

Yaitu wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan mengenai informasi perusahaan dan pertanggungjawaban data yang ada dalam penulisan ini.

b. Kuesioner (*Angket*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabkan.

c. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian atau elemen langsung untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan menggunakan metode ini penulis mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Dari penjelasan diatas, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode pengumpulan data adalah:

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

a. *Interview* (Wawancara)

Yaitu wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan mengenai informasi perusahaan dan pertanggungjawaban data yang ada dalam penulisan ini.

b. *Observation* (Pengamatan)

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian atau elemen langsung untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mempelajari buku-buku peraturan-peraturan dan berbagai sumber bacaan lain yang berhubungan dengan laporan keuangan berbasis akrual, serta mempelajari data-data yang didapat dari instansi yang bersangkutan.

Menurut Soeratno (2008:70) jenis data yang digunakan menurut sumbernya adalah:

1. Data primer

Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.

Adapun data sekunder yang berhasil penulis kumpulkan, yaitu:

1. laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan kecamatan Ilir Barat I tahun 2013 dan 2014.
2. Sejarah singkat Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
3. Struktur organisasi Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan dalam pembuatan laporan akhir. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulis, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Mengemukakan teori-teori yang digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan masalah. Adapun teori-teori tersebut antara lain pengertian Pemerintahan, Pemerintah Pusat dan Daerah, pengertian Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Kas menuju Akrua, SAP Berbasis Akrua, dan Strategi Implementasi SAP.

## **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Memberikan gambaran mengenai Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan prioritas kecamatan.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan dan analisa penulis dari masalah yang ada, analisis itu meliputi bagaimana proses persiapan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrua oleh Kantor Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, penulis menarik kesimpulan dari hasil pemecahan permasalahan yang ada, kemudian penulis akan memberikan masukan yang dapat membantu Kantor Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.